

LOK.PPM.17

L O K A K A R Y A

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN
EVALUASI KULIAH KERJA NYATA IPB
BOGOR, 21-22 DESEMBER 1988

PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
KARAWANG TERHADAP PROGRAM DAN ORGANISASI
PELAKSANAAN KKN IPB

Oleh

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

PENYELENGGARA

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1988

PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KARAWANG
TERHADAP PROGRAM DAN ORGANISASI PELAKSANAAN KKN IPB 1)

Oleh:

PEMDA TINGKAT II KABUPATEN KARAWANG 2)

I. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu kegiatan yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mendapat dukungan dari semua pihak, antara lain Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terarah dan terpadu.

Kabupaten Karawang salah satu Daerah yang telah mendapat kepercayaan untuk mengadakan kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor dan telah dirintis sejak tahun 1974.

Telah banyak manfaat yang diperoleh dari hasil kerjasama tersebut, misalnya perintisan pengembangan program Bimbingan Masal (Bimas) yang diangkat jadi suatu model Pembinaan Petani, mula-mula dilakukan di Karawang.

Institut Pertanian Bogor (IPB) memilih lokasi kerjasama di Karawang adalah sangat tepat. Hal ini sangat relevan dengan kondisi dan potensi Kabupaten Karawang yang telah mendapat predikat "Lumbung Padi Jawa Barat" dimana sebagian

1) Disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Program Pengabdian pada Masyarakat dan Evaluasi KKN IPB, tanggal 21 - 22 Desember 1988 di LPPM IPB, Bogor

2) Pemda Tingkat II Kabupaten Karawang

besar tanahnya merupakan lahan pertanian terutama sawah, yaitu seluas 102.319 Ha atau sekitar 59,15% dari luas keseluruhan. Di lain pihak kondisi tersebut merupakan potensi bagi Institut Pertanian Bogor dalam pengembangan ilmu dan teknologi sesuai dengan bidang garapannya.

Kebijaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang, merupakan penerapan kebijaksanaan Jawa Barat dan Nasional yang disesuaikan dengan permasalahan pokok yang ada di daerah meliputi 5 (lima) kebijaksanaan strategis.

1. Kebijakan mutu sumberdaya manusia.
2. Kebijakan perluasan dan pengembangan lembaga ekonomi terutama Koperasi.
3. Kebijakan perluasan kesempatan kerja yang wajar terutama di pedesaan.
4. Kebijakan pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah.
5. Kebijakan dalam pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Adapun kebijaksanaan pembangunan sektor pendidikan sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah telah ditetapkan antara lain diarahkan pada peningkatan kejasama dengan Perguruan Tinggi, terutama dalam hubungannya dengan penggalian dan pengembangan potensi daerah melalui program KKN yang lebih dititik beratkan pada usaha motivasi masyarakat untuk percepatan pembangunan di desa.

Dengan demikian kehadiran dan peranserta Perguruan Tinggi di Kabupaten Karawang sangat diperlukan saat ini maupun dimasa-masa mendatang, terutama dalam penerapan teknologi pedesaan untuk mempercepat pencapaian klasifikasi desa Swasembaga menjelang lepas landas pada Pelita ke VI.

II. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN KKN

Manfaat yang diperoleh sebagai dampak pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata telah banyak dirasakan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat pedesaan.

Walaupun sulit diukur secara kuantitatif, KKN selain bermanfaat dalam menunjang program pembangunan di daerah, yang terutama dapat dirasakan, juga dapat dijadikan sebagai media alih Teknologi Tepat Guna dari insan akademis yang memiliki segudang teori kepada masyarakat awan di pedesaan.

Jika kita kaji secara umum tahapan pelaksanaan KKN di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan.

Tahap persiapan ini dimulai dengan pemberitahuan rencana pelaksanaan KKN dilanjutkan dengan penjajagan lokasi oleh Dosen Pembimbing untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah tentang kesepatan penetapan Kecamatan dan Desa calon lokasi kegiatan.

Kegiatan selanjutnya dalah penyampaian informasi dari Pemerintah Daerah kepada para mahasiswa calon peserta ten-

tang kondisi dan potensi daerah. Kegiatan ini dirasakan amat penting terutama bagi mahasiswa sebagai orientasi awal terhadap permasalahan di daerah, agar mereka lebih siap tempur dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya kegiatan pembekalan ini perlu lebih ditingkatkan.

Kalau kemungkinan permasalahan umum di daerah telah diketahui secara dini baik oleh dosen pembimbing maupun oleh mahasiswa calon peserta, maka diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terprogram sehingga hasilnya akan lebih baik dan terarah.

2. Tahap Pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya diawali dengan acara penyambutan/penerimaan mahasiswa di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang diisi dengan pengarahan Bupati dan diskusi antara Pemerintah Daerah serta Dinas/Instansi terkait dengan para mahasiswa.

Pada minggu pertama di desa lokasi, biasanya mahasiswa mengawali kegiatannya dengan orientasi permasalahan yang akan dihadapi melalui kegiatan pengenalan dan dialog langsung dengan masyarakat kelompok sasaran. Hasilnya dituangkan dalam konsep program kegiatan yang kemudian dibahas dalam lokakarya awal di Tingkat Kecamatan. Hadir dalam acara tersebut unsur-unsur dari:

- a) Mahasiswa peserta KKN
- b) Dosen Pembimbing.

- c) Kepala Desa dan LKMD dari lokasi kegiatan.
- d) Camat dan Instansi terkait Tingkat Kecamatan.
- e) Tim Penyelenggara KKN dari Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya mahasiswa melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati bersama, sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Kemudian pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi dan laporan dalam acara lokakarya akhir di Tingkat Kabupaten yang biasanya bersamaan dengan acara penutupan/pelepasan oleh Bupati Kepala Daerah yang juga dihadiri oleh Dinas/Instansi terkait.

Program kegiatan yang dilaksanakan biasanya meliputi:

- a) Usaha peningkatan produksi pangan dan penanganan pasca panen.
- b) Peningkatan produksi perikanan dan peternakan.
- c) Penghijauan dan tanaman pekarangan.
- d) Pembinaan Industri Kecil Pedesaan.
- e) Pembinaan Generasi Pemuda dan Peranan Wanita.
- f) Pendayagunaan Koperasi.
- g) Peningkatan kesehatan, Kependudukan dan KB.
- h) Penertiban Administrasi Desa.
- i) Peningkatan Pendidikan dan Agama dan sebagainya.

Pelaksanaan kegiatan KKN IPB sebelum tahun 1983 berlangsung selama 3 (tiga) bulan penuh. Sebagian besar kegiatannya berupa pengabdian pada masyarakat secara murni. Artinya para mahasiswa tidak dibebani dengan kegiatan

praktek lapangan berupa studi penelitian untuk bahan penyusunan skripsi.

Kemudian hasil kesepakatan pada lokakarya evaluasi KKN, bulan Pebruari 1984 di BIOTROP Bogor, telah ditetapkan bahwa: Pelaksanaan KKN selama 3 bulan diisi dengan kegiatan KKN murni selama 2 bulan, dan praktek lapangan (PL) selama 1 (satu) bulan.

Pada akhir-akhir ini pelaksanaan KKN IPB telah berubah menjadi selam 2 bulan dengan kegiatan praktek lapangan (PL) secara penuh. Hal ini menurut Pemerintah Daerah kurang efektif. Sebab para mahasiswa dalam pelaksanaannya lebih mementingkan kegiatan penelitian untuk skripsinya, daripada kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dirasakan manfaatnya oleh daerah. Oleh karenanya hal ini perlu mendapat perhatian bersama untuk ditinjau lebih lanjut.

3. Tahap Pembinaan Tindak Lanjut

Suatu pelaksanaan kegiatan tidak akan dapat bermanfaat secara maksimal, tanpa diikuti dengan pembinaan tindak lanjut guna memelihara dan menyempurnakan hasil-hasil yang telah diperoleh. Demikian pula dengan kegiatan KKN yang dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dengan segala keterbatasannya, perlu ada estapet pelaksanaan dari para mahasiswa kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sehingga setiap program yang telah dilaksanakan akan lestari dan berkesinambungan. Selain itu pula Pemerintah Daerah sangat

mengharapkan adanya umpan balik (Feed Back) dari pihak Perguruan Tinggi sebagai kegiatan pasca KKN berupa resep pemecahan masalah yang dihadapi di Daerah menurut visi para teknokrat di Lembaga Pendidikan Tinggi.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program KKN, sebaiknya ditetapkan indikator-indikator tertentu, sehingga semua pihak dapat melihat dan mengukur sejauh mana pencapaian hasil kegiatan sesuai dengan perencanaan semula. Selain itu pula pada mahasiswa dapat mengetahui Keluaran (out put) apa yang harus mereka capai selama melaksanakan kegiatan KKN nya. Sebab jika target keluaran tidak diketahui, seringkali mahasiswa merasa dibebani dengan tanggungjawab penanggulangan masalah yang terjadi di Desa yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Padahal pada umumnya hasil serta manfaat KKN baru dapat dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang relatif lama dan bukan pada akhir pelaksanaan kegiatan.

III. PERMASALAHAN

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan kegiatan KKN IPB di Kabupaten Karawang, dirasakan masih terdapat permasalahan yang perlu kita tanggulangi bersama demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Sesuai dengan tahapan pelaksanaannya, masalah yang ada kami kelompokkan sebagai berikut:

1. Pada tahap persiapan terdiri dari:

- a) Pemberitahuan rencana pelaksanaan KKN dari IPB kepada Pemerintah Daerah seringkali disampaikan secara mendadak.
- b) Dalam penetapan lokasi, pihak IPB cenderung memilih desa yang mudah dijangkau. Hal ini kadang-kadang berbeda dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
- c) Kegiatan pembekalan bagi mahasiswa calon peserta di Kampus seringkali tidak dilakukan.

2. Pada tahap pelaksanaan:

- a) Seringkali dihadapkan pada keterbatasan dana untuk menunjang kegiatan KKN baik dari Pemerintah Daerah maupun dari IPB.
- b) Keterbatasan tenaga dan waktu untuk melakukan monitoring selama kegiatan KKN berlangsung.
- c) Para mahasiswa lebih mementingkan kegiatan penelitian daripada pengabdian pada masyarakat.
- d) Para dosen pembimbing seringkali tidak berada di desa lokasi.
- e) Kegiatan Lokakarya di Daerah belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pada tahapan Pembinaan Tindak Lanjut

- a) Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat melakukan estapet kegiatan yang telah dirintis oleh para mahasiswa.

- b) Seringkali pihak Perguruan Tinggi tidak menyampaikan umpan balik (feed back) kepada Daerah berupa informasi tindak lanjut pemecahan masalah yang ditemukan.
- c) Lokakarya evaluasi pelaksanaan KKN di Kampus tidak dilakukan setiap tahun.
- d) Selama ini realisasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan IPB baru terbatas pada pelaksanaan kegiatan KKN, belum ditunjang dengan kegiatan lain yang lebih berdayaguna dan berhasilguna.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN:

Program kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan Institut Pertanian Bogor telah dirintis sejak tahun 1974 yang realisasinya antara lain berupa kegiatan KKN, telah banyak dirasakan manfaatnya baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Oleh karenanya jalinan kerjasama ini perlu diteruskan dan lebih ditingkatkan lagi dengan menambah kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya disesuaikan dengan kepentingan kedua belah pihak.

Pelaksanaan KKN tahun 1988/1989 di Kabupaten Karawang direncanakan pada bulan Pebruari yang akan datang di Kecamatan Batujaya dan Pangkalan masing-masing di 4 desa.

2. S A R A N:

Bertitik tolak dari permasalahan yang selama ini masih dirasakan, nampaknya Pemerintah Daerah dan IPB perlu melakukan penertiban dan penyempurnaan lebih lanjut, agar pelaksanaan KKN yang akan datang dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pelaksanaan KKN perlu dikembalikan pada citra semula sebagai media pengabdian pada masyarakat dari Lembaga Pendidikan Tinggi yang lebih menguasai teknologi tepat guna dalam rangka pelaksanaan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu pula diharapkan dapat memberikan resep yang tepat bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan yang bersifat multi-dimensional.

V. PENUTUP

Demikian persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap pelaksanaan KKN IPB yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya buah pikiran ini masih jauh dari yang diharapkan. Namun demikian semoga dapat bermanfaat bagi upaya peningkatan kerjasama kita dimasa mendatang.

Kami mohon maaf apabila terdapat kekhilafan yang kurang berkenan dan menghaturkan terima kasih kepada semua pihak terutama Keluarga Besar Institut Pertanian Bogor atas segala bantuannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatnya dan karunianya pada kita sekalian.